



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 April 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOER AZAM ACHSANI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 128448

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.635.904.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/130 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 344.112.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 1.854 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 1.897 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/87 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 399.792.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/62 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 625.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **180.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	2.000.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	7.421.293.676
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.237.197.676

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.237.197.676

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.